

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Ekonomi pembangunan berkaitan dengan strategi untuk pertumbuhan ekonomi, transformasi sosial, dan perluasan kemungkinan bagi populasi di negara berkembang melalui bantuan pemerintah dan sektor swasta untuk kesehatan, pendidikan, dan kondisi kerja yang lebih baik. Ekonomi pembangunan juga mempelajari aspek ekonomi pembangunan, termasuk proses pembangunan, di negara-negara tersebut. Seiring dengan pertumbuhan penduduk suatu negara, pendapatan keseluruhan dan pendapatan per kapita meningkat. Hal ini dikenal sebagai pembangunan ekonomi. Seiring dengan ini, struktur ekonomi negara mengalami perubahan mendasar, dan pemerataan pendapatan bagi masyarakat.

Pengangguran merupakan masalah strategis dalam perekonomian secara makro, karena berpengaruh langsung kepada standar kehidupan dan tekanan psikologis masyarakat. Faktor penting yang menentukan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat adalah pendapatannya. Pendapatan yang maksimum tercapai jika tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dapat direalisasikan. Pengangguran dapat mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya akan menurunkan tingkat kesejahteraan. Hasyim (2016:197).

Masalah pengangguran merupakan masalah ekonomi yang dapat mewujudkan beberapa efek buruk yang bersifat ekonomi politik dan ekonomi sosial. Untuk menghindari berbagai efek buruk yang mungkin timbul, berbagai kebijakan ekonomi perlu dijalankan. Untuk menghindari efek-efek buruk tersebut

pemerintah perlu secara terus-menerus berusaha mengatasi masalah pengangguran. Pemerintah juga harus mempunyai kebijakan untuk mengatasi masalah pengangguran dan juga berusaha untuk mencapai beberapa tujuan yang bersifat politik dan sosial, Sukirno (2019:327).

Menurut Pratowo (2019:86).Pengangguran berdasarkan survei penduduk atas sensus tahun 1985 mengartikannya sebagai seseorang yang mencari pekerjaan atau berusaha mencari pekerjaan yang tidak memiliki batasan waktu satu minggu saja, namun dapat dilakukan dalam periode sebelumnya selama dalam kurun waktu satu minggu sebelum pencacahan masih berada pada status masih menunggu respons dari lamaran. Menurut Sukirno, pengangguran adalah jumlah tenaga kerja yang ada pada perekonomian baik secara aktif mencari pekerjaan atau belum memperoleh pekerjaan.

Pengangguran merupakan suatu fenomena yang terjadi di semua negara berkembang tidak terkecuali di Indonesia. Pengangguran merupakan suatu permasalahan yang serius di Indonesia karena dampak dari adanya pengangguran akan menimbulkan masalah sosial. Pengangguran yang tinggi dapat menjadi sumber utama kemiskinan, dapat memicu kriminalitas yang tinggi serta dapat menghambat pembangunan dalam jangka panjang. Sari (2019:16).

Pengangguran juga merupakan pilihan bagi setiap individu. Di satu sisi, ada orang yang memang menyukai dan tidak ingin bekerja karena mereka malas, di lain pihak ada orang yang ingin bekerja dan sedang mencari pekerjaan tetapi mereka belum mendapatkan karena tidak sesuai dengan pilihannya atau bisa disebut dengan

pengangguran sukarela. Salah satu gambaran dampak dari tingginya tingkat pengangguran yaitu akan ada banyaknya sumber daya yang terbuang percuma dan pendapatan masyarakat berkurang. Dalam masa-masa seperti itu, tekanan ekonomi menjalar kemana-mana sehingga mempengaruhi emosi masyarakat maupun kehidupan rumah tangga sehingga akan mengurangi kesejahteraan masyarakat. Naf'an (2014:132).

Jumlah penduduk dalam pembangunan ekonomi suatu daerah merupakan permasalahan yang sangat mendasar sebab dengan pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pembangunan ekonomi yaitu kesejahteraan rakyat serta mengancam peningkatan pengangguran. Secara umum penduduk adalah setiap orang yang berdomisili atau bertempat tinggal di dalam suatu wilayah negara dalam waktu yang cukup lama. Jumlah penduduk yang semakin meningkat diikuti dengan jumlah pengangguran apabila tidak diimbangi dengan peningkatan kesempatan kerja.

Menurut Bidarti (2020:184) Jumlah penduduk di suatu wilayah tidaklah tetap, namun akan selalu berubah – ubah (bertambah atau berkurang) seiring dengan perjalanan waktu. Jumlah penduduk yang makin besar telah membawa akibat yaitu jumlah angkatan yang makin besar pula. Ini berarti makin besar pula jumlah orang yang mencari pekerjaan atau menganggur. Agar dapat dicapai keadaan yang seimbang maka mereka semua dapat tertampung dalam suatu pekerjaan yang cocok dengan keinginan serta keterampilan mereka. Ini akan membawa konsekuensi bahwa perekonomian harus selalu menyediakan lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja baru.

Peningkatan kualitas produktivitas tenaga kerja tidak terlepas dari upaya peningkatan sumber daya manusia melalui jalur pendidikan latihan standar upah yang baik, serta pengembangan yang dihasilkan dan disesuaikan dengan kemajuan ilmu dan teknologi. Tanpa suatu program pengembangan sumber daya manusia, maka produktivitas tenaga kerja.

Jumlah penduduk dalam pembangunan ekonomi suatu daerah merupakan permasalahan yang sangat mendasar dengan pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pembangunan ekonomi yaitu kesejahteraan rakyat serta mengancam peningkatan pengangguran.

Pertumbuhan penduduk merupakan proses perubahan jumlah penduduk serta komposisinya yang dipengaruhi tiga komponen demografi yaitu fertilitas, mortalitas dan migrasi. Migrasi juga mempengaruhi tingkat pengangguran menurut Mulyadi (2016, 412) Provinsi Jambi, pada pola migrasi di sebagian daerah yang menarik migrasi karena potensi ekonominya, mungkin menghadapi masalah pengangguran jika tidak mampu menyediakan lapangan kerja yang memadai untuk pendatang. Karena jumlah penduduk yang tinggi di Provinsi Jambi. Berikut Tabel 1.1 jumlah penduduk Provinsi Jambi 2004-2023.

Tabel. 1.1
Jumlah Penduduk di Provinsi Jambi tahun 2004-2023

No	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Perkembangan (%)
1	2004	2.619.553	-
2	2005	2.635.968	0,63
3	2006	2.683.099	1,79

4	2007	2.742.196	2,20
5	2008	2.788.269	1,68
6	2009	2.834.164	1,65
7	2010	3.092.265	9,11
8	2011	3.169.814	2,51
9	2012	3.242.814	2,30
10	2013	3.317.034	2,29
11	2014	3.344.421	0,83
12	2015	3.402.052	1,72
13	2016	3.458.926	1,67
14	2017	3.515.017	1,62
15	2018	3.570.272	1,57
16	2019	3.624.579	1,52
17	2020	3.677.894	1,47
18	2021	3.585.100	(2,52)
19	2022	3.631.100	1,28
20	2023	3.760.275	3,56
Rata-rata		3.234.741	1,94

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi 2024.

Keterangan : () Negatif

Berdasarkan tabel 1.1, tahun 2004 - 2023 telah menggambarkan jumlah penduduk yang mengalami perubahan atau fluktuasi. Pada tahun 2023, jumlah penduduk mencapai angka tertinggi dalam rentan waktu yang di amati, menunjukkan pertumbuhan yang signifikan sejak tahun 2004. Sebaliknya, pada tahun 2004 mencatat jumlah penduduk terendah dalam periode ini. Pada tahun 2004, jumlah penduduk mencapai 2.619.553 ribu jiwa, yang merupakan angka terendah dalam periode ini. Dari tahun 2004 hingga 2023, terjadi peningkatan

jumlah penduduk secara signifikan. Data menunjukkan pertumbuhan yang konsisten setiap tahunnya dan kemungkinan faktor-faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan populasi. Pada tahun 2023, jumlah penduduk mencapai 3.760.275 dengan persentase 3,56%, merupakan angka tertinggi dalam periode ini. Dan hal ini mampu menggambarkan bahwa adanya perhatian dari pemerintah daerah untuk menekan tingkat jumlah penduduk di Provinsi Jambi melalui pemerataan lapangan pekerjaan dan menekan adanya pertumbuhan penduduk dengan program keluarga berencana.

Pada penjelasan seran (2016:7), Pendidikan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja, karena peningkatan produktivitas tenaga kerja yang bertumpu pada pendidikan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kerja manusia dan untuk meningkatkan taraf hidup manusianya. Pada umumnya seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan mempunyai wawasan yang lebih luas untuk meningkatkan kinerjanya. Pendidikan sebagai pengalaman belajar mempunyai bentuk, suasana, dan pola yang beraneka ragam. Pendidikan juga adalah suatu usaha sadar yang teratur dan sistematis, yang dilakukan oleh orang-orang yang disertai tanggung jawab untuk mempengaruhi anak agar mempunyai sifat dan tabiat sesuai dengan cita-cita pendidikan, Rodliyah (2021:28) .Tabel berikut menggambarkan Tingkat Pendidikan Provinsi Jambi 2009-2023.

Tabel 1.2

Rata-Rata Lama Sekolah di Provinsi Jambi tahun 2004-2023.

No	Tahun	Rata-Rata Lama Sekolah (%)	(%)
1	2004	7,40	-
2	2005	7,54	1,89
3	2006	7,60	0,80
4	2007	7,66	0,79
5	2008	7,63	(0,39)
6	2009	7,68	0,66
7	2010	7,34	(4,43)
8	2011	7,48	1,91
9	2012	7,69	2,81
10	2013	7,80	1,43
11	2014	7,92	1,54
12	2015	7,96	0,51
13	2016	8,07	1,38
14	2017	8,15	0,99
15	2018	8,23	0,98
16	2019	8,45	2,67
17	2020	8,55	1,18
18	2021	8,60	0,58
19	2022	8,68	0,93
20	2023	8,81	1,50
Rata-Rata		7,96	0,93

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi 2024.

Keterangan : () Negatif.

Berdasarkan Tabel 1.2, pada tahun 2004 - 2023 telah menggambarkan data rata-rata lama sekolah yang mengalami perubahan atau fluktuasi. Meskipun ada

peningkatan secara keseluruhan selama 20 tahun terakhir, ada periode di mana angka rata-rata ini mengalami penurunan yang tajam, terutama pada tahun 2010 mencapai 7,34 dengan persentase -4,43%. Penurunan yang cukup drastis pada tahun 2010 merupakan tantangan untuk menghadapi sistem pendidikan pada waktu itu, mungkin keterbatasan sumber daya guru yang mengajar atau kebijakan pendidikan yang belum sepenuhnya efektif. Sedangkan pada tahun 2023, angka rata-rata lama sekolah merupakan angka yang paling tinggi dengan angka 8,81 dengan persentase 1,50%. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti peningkatan anggaran pendidikan, pembangunan infrastruktur sekolah yang lebih merata, dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dan semua belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD.

Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan dianggarkan secara bruto dalam APBD, Brain (2023:25). Berikut tabel menggambarkan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di Provinsi Jambi tahun 2004-2023.

Tabel 1.3
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di
Provinsi Jambi 2004-2023.

No	Tahun	Pendapatan (Juta Rupiah)	Belanja (Juta Rupiah)	Silpa (Juta Rupiah)	
				Defisit	Surplus
1	2004	649.936	660.930	10.993	-
2	2005	748.821	642.833	-	105.988
3	2006	894.925	1.156.843	261.918	-
4	2007	1.155.351	1.105.388	-	49.963
5	2008	1.436.381	1.404.982	-	31.399
6	2009	1.353.900	1.530.073	176.173	-
7	2010	1.304.935	1.504.838	199.903	-
8	2011	2.078.807	2.432.067	353.260	-
9	2012	2.654.694	3.287.095	632.401	-
10	2013	2.886.305	3.577.072	690.767	-
11	2014	2.981.991	3.265.320	283.328	-
12	2015	3.129.719	3.604.245	474.526	-
13	2016	3.203.974	3.381.885	177.910	-
14	2017	4.305.265	4.583.486	278.221	-
15	2018	4.412.465	4.869.537	457.072	-
16	2019	4.575.193	5.244.690	669.497	-
17	2020	4.400.624	4.802.948	402.323	-
18	2021	4.294.675	4.534.149	239.474	-
19	2022	4.705.588	4.772.689	67.101	-
20	2023	4.909.073	5.501.684	592.610	-
Rata-Rata		2.804.131	3.093.137	351.028	62.450

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi 2024

Keterangan : % Perkembangan

Berdasarkan tabel 1.3, tahun 2004-2023 telah menggambarkan realisasi APBD yang mengalami perubahan atau fluktuasi. Pada tahun 2004 merupakan

tahun dengan angka realisasi anggaran yang paling kecil selama 20 tahun terakhir, yakni sebesar Rp 649.936. Angka ini merupakan kondisi ekonomi dan kapasitas fiskal Provinsi Jambi yang masih terbatas. Sebaliknya, pada tahun 2023, realisasi anggaran yang mempunyai angka yang paling tinggi selama 20 tahun terakhir yaitu sebesar Rp 5.433.538, jauh lebih besar dibandingkan dengan tahun 2004. Kenaikan ini menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Jambi telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam hal kapasitas fiskal dan peningkatan kebutuhan pembangunan.

Pengangguran Terbuka adalah keadaan seseorang yang sama sekali tidak bekerja dan sedang berusaha mencari pekerjaan. Pengangguran terbuka disebabkan oleh lapangan kerja yang tidak tersedia atau tidak adanya kecocokan antara lowongan kerja dan latar belakang pendidikan. Masalah pengangguran ini bukanlah masalah baru, itu mempengaruhi hampir semua provinsi di Indonesia, termasuk Jambi. Salah satu provinsi yang menghadapi masalah ekonomi adalah Jambi yang memiliki tingkat pengangguran sangat penting untuk menentukan apakah kemajuan ekonomi berhasil atau gagal. Apabila pengangguran tersebut tidak segera diatasi maka akan menimbulkan ketimpangan dari segi ekonomi. Maka karena tingkat pengangguran berfungsi sebagai ukuran seberapa sejahtera masyarakat. Pengangguran terbuka di Jambi merupakan persoalan yang pelik karena dapat berdampak pada beberapa persoalan yang saling berkaitan. Kurangnya pekerjaan atau tawaran pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan pendidikan menyebabkan pengangguran. Jumlah orang yang menanggur terhadap seluruh angkatan kerja

dikenal sebagai tingkat pengangguran terbuka. Tabel berikut ini menggambarkan Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jambi tahun 2009 -2023.

Tabel 1.4
Tingkat Pengangguran di Provinsi Jambi tahun 2009 - 2023.

NO	TAHUN	Tingkat Pengangguran (%)	Jumlah Pengangguran (Jiwa)	Angkatan Kerja (Jiwa)	Perkembangan pengangguran (%)
1	2004	6,04	73.108	1.137.460	-
2	2005	10,74	133.964	1.247.114	83,24
3	2006	6,62	78.264	1.181.650	(41,58)
4	2007	6,22	76.090	1.222.951	(2,78)
5	2008	5,14	66.371	1.290.854	(12,77)
6	2009	5,54	73.904	1.334.496	11,35
7	2010	5,08	83.278	1.545.683	12,68
8	2011	4,02	60.169	1.482.335	(27,75)
9	2012	3,22	42.296	1.494.974	(29,70)
10	2013	4,84	70.361	1.467.007	66,35
11	2014	5,08	79.784	1.570.822	13,39
12	2015	4,34	70.349	1.620.752	(11,83)
13	2016	4,00	67.671	1.692.193	(3,81)
14	2017	3,87	66.816	1.724.633	(1,26)
15	2018	3,86	69.075	1.791.899	3,38
16	2019	4,19	73.965	1.683.575	7,08
17	2020	5,13	93.990	1.739.033	27,07

NO	TAHUN	Tingkat Pengangguran (%)	Jumlah Pengangguran (Jiwa)	Angkatan Kerja (Jiwa)	Perkembangan pengangguran (%)
18	2021	5,09	93.754	1.840.594	(0,25)
19	2022	4,59	86.459	1.884.278	(7,78)
20	2023	4,53	85.579	1.887.840	(1,02)
Rata-rata		38,90	77,262	1.542.007	4,42

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi 2024.

Keterangan : () Negatif.

% Perkembangan

Pada Tabel 1.4, Tahun 2004-2023 telah menggambarkan jumlah pengangguran yang mengalami perubahan atau berfluktuasi. Berbagai faktor ekonomi, sosial dan kebijakan pemerintah mempengaruhi jumlah pengangguran dari tahun ke tahun. Secara umum, tahun 2005 sebagai tahun dengan jumlah pengangguran tertinggi dan tahun 2012 sebagai tahun dengan angka pengangguran terendah. Pada tahun 2005, angka pengangguran berada pada angka tertinggi dari faktor-faktor yang mempengaruhi pasar tenaga kerja, pada tahun itu pengangguran mencapai angka 133.964 jiwa dengan persentase 83,24%. Sedangkan, pada tahun 2012, pemerintah Provinsi Jambi berhasil menekan angka pengangguran hingga mencapai titik terendah dengan angka 42.296 jiwa dan persentasenya -29,70%, yang menandakan adanya perbaikan ekonomi dan keberhasilan kebijakan yang diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulisan tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Terhadap Jumlah Pengangguran Terbuka di Provinsi Jambi”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang yang di temukan di atas dapat di Identifikasikan permasalahan sebagai berikut:

1. Pengangguran Terbuka dari tahun 2004-2023 mengalami fluktuasi di Provinsi Jambi.
2. Jumlah Penduduk dari tahun 2004-2023 mengalami fluktuasi di Provinsi Jambi.
3. Tingkat Pendidikan dari tahun 2004-2023 mengalami fluktuasi cenderung menurun di Provinsi Jambi.
4. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari tahun 2004-2023 mengalami fluktuasi di Provinsi Jambi.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan dan Realisasi APBD secara simultan terhadap perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jambi
2. Bagaimana pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan dan Realisasi APBD secara parsial terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jambi

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan dan Realisasi APBD secara simultan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jambi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan dan Realisasi APBD secara parsial terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jambi.

1.5 Manfaat

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka dari itu diharapkan memiliki manfaat secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk Akademisi

Diharapkan dapat bermanfaat untuk penelitian serta perkembangan dinamika teori ekonomi khususnya yang berhubungan dengan pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan dan Realisasi APBD terhadap masalah Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jambi.

- b. Untuk Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah Provinsi Jambi sebagai gambaran dan informasi untuk keperluan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan dan Realisasi APBD terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Jambi.

c. Untuk Teoritis

Dapat memberikan sumbangan pemikiran pada pemerintah atau instansi terkait, khususnya pemerintah dalam penentuan kebijakan dalam bidang Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan dan Realisasi APBD dalam masalah Tingkat Pengangguran Terbuka



